

Ada yang Terima Upeti Rp1,5 Miliar KPK Dorong Dahlan Laporkan Pemalak

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk melaporkan (oknum) anggota DPR yang meminta upeti dari BUMN.

"Sebaiknya memang disampaikan kepada KPK. Sehingga KPK bisa telaah lebih jauh apakah valid atau tidak," ujar Juru Bicara KPK Johan

Budi saat jumpa pers di KPK, Rabu (31/10).

■ Halaman 7

KPK Dorong

dari halaman 1

Dahlan pernah menyebutkan salah seorang oknum anggota DPR RI meminta jatah 10 persen pada perusahaan BUMN kecil yang mengurus petani tambak. Padahal perusahaan itu sedang membutuhkan bantuan dana dari APBN. Bahkan jatah itu bukan hanya untuk satu melainkan beberapa orang.

"Kalau hanya statement seperti itu, KPK tidak bisa melakukan penelusuran. Harus ada informasi lengkap. Kalau Pak Dahlan ke KPK kita sangat terbuka, sehingga tidak terjadi polemik," kata Johan.

Tak hanya soal pemalak, KPK menyatakan siap menelusuri inefisiensi sebesar Rp37 triliun di Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2010. Itu dapat dilakukan setelah laporan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Inefisiensi itu sendiri adalah temuan dari BPK. Tetapi, hingga saat ini, BPK belum memberikannya pada institusi penegak hukum, termasuk KPK.

"Kalau dari hasil audit BPK ada informasi-informasi yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK tentu akan ditindaklanjuti. Tapi sampai saat ini kita belum menerima hasil audit BPK yang berkaitan dengan PLN itu," ujar Johan Budi di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (31/10).

Lanjutnya, jika BPK menyebut ada auditnya yang berindikasi pidana, tentu akan langsung diserahkan pada KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Sejauh ini, KPK juga belum membuat kajian terkait dugaan rentannya BUMN yang menjadi sapi perahan oknum di Senayan.

"Kita enggak mau mintaminta (laporan BPK) ya tapi kita menunggu. Sampai hari ini kita belum melakukan kajian terkait rentannya BUMN tersebut," pungkas Johan.

PDIP dan FPAN Dukung

Tak hanya KPK. Sekjen PDIP Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta Dahlan Iskan membuka seterang-terangnya oknum DPR yang melakukan

pemerasan terhadap sejumlah BUMN.

Kata Tjahjo itu bisa dilakukan jika Badan Kehormatan DPR segera memanggil Dahlan Iskan dan pimpinan Komisi di DPR yang tugasnya berkaitan dengan BUMN.

"Tanpa inisial, sebut dengan jelas anggota DPR tersebut dari fraksi, nama lengkapnya, Komisi mana dan BUMN mana yang merasa diperas anggota DPR tersebut," kata Tjahjo, Rabu (31/10).

Hal tersebut menjadi penting untuk mewujudkan transparansi dan tidak menimbulkan teka-teki di masyarakat. Dan DPR serta Kementerian BUMN tidak timbulkan isu negatif. "Saya mendukung upaya Menteri Dahlan Iskan sebut nama-nama Anggota DPR yang kongkalikong dengan BUMN," pungkasnya.

Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR juga serupa, agar Dahlan Iskan tidak ragu-ragu membuka nama-nama para pemalak itu. FPAN juga mendesak agar Dahlan Iskan dan Kementerian BUMN tidak hanya menebar desas-desus.

"Maka sebaiknya segera melaporkan secara formal ke Badan Kehormatan DPR disertai bukti-buktinya," kata Sekretaris F-PAN di DPR, Teguh Juwarno, Rabu (31/10).

Investasi BUMN

Di sisi lain, Menteri BUMN Dahlan Iskan akan mengevaluasi kucuran penanaman modal negara (PMN) untuk sejumlah BUMN pada 2013. "Ke depan saya tidak mau. Kalau mati, ya mati saja," kata Dahlan di kantornya, Rabu, 31 Oktober 2012.

Evaluasi Dahlan dilakukan menyusul adanya laporan bahwa sejumlah BUMN diminta menyetorkan upeti kepada anggota DPR sebagai syarat pencairan PMN. "Mengapa untuk mencairkan sesuatu yang telah disetujui, harus lewat DPR lagi? Maksudnya apa?" kata Dahlan seperti dikutip Tempo.co.

Dahlan Iskan mengatakan akan memecat para direk-

si BUMN yang kedapatan berkongkalikong dengan DPR. "Kalau sampai ada, saya pecat," ujarnya.

Upeti

Sementara itu, mantan Sesditjen LPE Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Soekandar, menyebut anggota Komisi VII DPR RI menerima aliran dana senilai Rp1,5 miliar dari Ditjen Listrik Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian ESDM pada 2007.

Pemberian jatah itu terkait pembahasan rancangan undang-undang (RUU) energi dan kelistrikan. Soekandar mengungkap itu saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System (SHS) TA 2007-2008 dengan terdakwa Kosasih Abbas dan Jacob Purnomo. Uang Rp1,5 miliar itu, menurut Soekandar, diserahkan stafnya bernama Asep Rahmat ke Sekretariat Komisi VII DPR.

"Jadi terdakwa II (Kosasih Abbas) datang ke tempat saya atas perintah terdakwa I (Jacob Purwono) untuk biaya pembahasan RUU energi dan kelistrikan. Jumlah yang diberikan Rp1,5 miliar," kesaksian Soekandar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/10).

Soekandar mengaku tidak tahu asal uang yang ditujukan kepada anggota DPR itu. Dia hanya tahu dana itu untuk biaya pembahasan RUU energi dan kelistrikan di DPR. Di antaranya digunakan untuk menutupi biaya hotel, biaya transportasi dan honor anggota DPR penyusun RUU. "Anggota tim penyusunan RUU termasuk dari DPR. Semua anggota DPR, Komisi VII," jelas Soekandar.

Seperti diketahui, terdakwa Jacob dan Kosasih diduga telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam pengadaan SHS tahun 2007 dan 2008. Dua proyek yang dilaksanakan saat era kepemimpinan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro itu diduga merugikan negara seluruhnya Rp144,8 miliar. (jpn)